

LKj

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAINAN, JANUARI 2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 telah dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan hasil pelaksanaan program/kegiatan komunikasi dan informatika pada tahun 2017 dan merupakan tahun pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2016-2021.

Program/kegiatan-kegiatan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan selama tahun 2017 adalah upaya peningkatan pendapatan dan terciptanya komunikasi dan informatika secara umum mencapai sasaran, namun demikian berbagai kendala masih menghambat pelaksanaan beberapa program/kegiatan sesuai sasaran yang diinginkan, hal ini kedepan tentu membutuhkan pemikiran lebih lanjut dalam pemecahan, serta melakukan perbaikan dan penajaman Renstra, Program dan Kegiatan pada periode 2016-2021 kedepan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Painan, Januari 2018
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan

JUNAIDI, S.Kom, ME
NIP. 19700609 199793 1 002





IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera"***

Pada tahun 2017 ada dua belas sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas Aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional
 2. Pengembangan Sistem Layanan Pemerintahan secara elektronik
 3. Penyediaan sarana prasarana jaringan
 4. Meningkatkan penerapan dan peningkatan kualitas layanan melalui aplikasi e-government pada layanan publik
 5. Pengembangan Sistem Aplikasi Informatika yang terintegrasi
 6. Meningkatkan keberagaman aplikasi dan konten yang aman dan sehat bagi masyarakat
 7. Meningkatkan Pengolahan informasi dan Dokumentasi melalui peningkatan layanan Pengaduan dan Pengolahan konten website
 8. Peningkatan kualitas layanan informasi melalui penyediaan Daftar Informasi Publik sesuai Standar Layanan Informasi Publik
 9. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi secara mandiri
 10. Meningkatkan peran lembaga komunikasi dan kemitraan media dalam penyebaran informasi.
 11. Penyediaan jaringan komunikasi data antar perangkat daerah melalui media Fiber Optick (FO).
 12. Melaksanakan pengamanan informasi dan data pemerintah daerah.
1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran adalah sebagai berikut :



A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
10. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pengadaan meubiler
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6. Rehab gedung kantor
7. Pembangunan Media Center
8. Pembangunan Command Center
9. Pembangunan Ruang Server
10. Pembangunan studio radio langkisau

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal
2. Pendidikan Sandiman



D. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

1. Operasional Radio Daerah
2. Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Operasional Komunikasi (SANTEL)
3. Operasional Penerangan Keliling, Pameran dan Posko Informasi
4. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
5. Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah melalui website
6. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Menara Radio Langkisau
7. Pengembangan sumberdaya TIK Kabupaten
8. Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Komunikasi dan Informatika

E. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

1. Publikasi dan Promosi Daerah

F. Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Informasi

1. Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Kabupaten Pesisir Selatan
2. Penyediaan Data Statistik

1. Sasaran yang telah ditetapkan tersebut terealisasi dengan baik karena ditunjang oleh program dan kegiatan yang terealisasi dengan tingkat capaian kinerja secara umum 100% kecuali sasaran peningkatan akses informasi komunikasi dengan capaian 0 %, dimana proses lelang gagal sebanyak 2 kali karena tidak mendapatkan penyedia yg sesuai dengan persyaratan perlu menjadi prioritas kerja untuk tahun kedepannya . Berdasarkan akuntabilitas keuangan, anggaran yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan terealisasi sebesar 96,14 %.

Untuk kedepannya diharapkan alokasi anggaran dapat ditingkatkan bagi pembangunan komunikasi dan informatika karena pembangunan bidang komunikasi dan informatika adalah prioritas pembangunan daerah dimana



Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang demikian pesat telah mendorong peran strategis informasi sebagai suatu modal dasar pembangunan. Berbagai potensi keunggulan lokal bangsa Indonesia seperti : keindahan alam Indonesia, iklim, sumber daya hayati baik pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, sumber daya mineral dan pertambangan, dan penduduk Indonesia yang beragam etnik, budaya, agama dan bahasa, bila dikemas sebagai suatu produk informasi yang tepat akan menjadi sumber kegiatan ekonomi yang tiada batasnya dan memiliki daya saing tinggi. Keunggulan khas Indonesia tersebut, perlu digali dan dikembangkan menjadi semacam National Information Database, yang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pertumbuhan sektor--sektor yang lain dan pada akhirnya dapat memajukan kesejahteraan bangsa



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada penyelenggaraan pemerintahan, agar program dan kegiatan yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dapat menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat, diperlukan sarana penyampaian informasi dari masyarakat yang selanjutnya diolah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan dan informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Proses tersebut, diperankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dan akan terasa cepat tepat, apabila memanfaatkan mekanisme komunikasi dengan informatika, yakni dengan menggabungkan antara informasi, komunikasi, dan telematika. Dengan kata lain, informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi (information of technology).

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 10 tahun 2013. Melalui Peraturan Daerah dimaksud, diharapkan terjadi penguatan kelembagaan dalam bidang informatika sejalan dengan tujuan pemerintah saat ini yang mengedepankan penggunaan teknologi (elektronik) dalam menunjang kinerja pelayanan birokrasi, disamping tugas pokoknya sebagai lembaga yang menangani komunikasi. Hal ini sangat terkait bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. E-Government didefinisikan



sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara LkIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kualitas pelayanan publik yang dilakukan dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2016.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan LAKIP dan Penetapan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;
5. Keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/4/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



6. Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 10 tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 3 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro.

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.
2. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.



1.4 Gambaran Umum

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro LkjlP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 nomor 10 tahun 2013, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1.4.1 Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2008 dalam bab XVII bagian ke limabelas pasal 46 ayat (1) disebutkan bahwa: “Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas Pembantuan bidang Komunikasi dan Informatika”.

1.4.2 Fungsi

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Informatika;
4. Pelaksanaan pengembangan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informasi;



5. Pengawasan dan Pengendalian teknis dibidang Komunikasi dan Informasi; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sesuai struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) terdiri dari 1 unit eselon II, 5 unit eselon III yang terdiri dari 1 sekretariat dan 4

A. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri dari :

a. Kepala Badan

Merumuskan program kerja dan petunjuk kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan serta melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

b. Sekretaris

Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, membagi tugas, member petunjuk, menilai dan menganalisis pelaksanaan kegiatan disekretariat meliputi urusan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan dan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Ketahanan



Pangan dan Penyuluhan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tertip administrasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu mengonsep rencana kegiatan, membagi tugas, member petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumahtangga dan perlengkapan, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor serta meneliti administrasi kepegawaian badan dan kesejahteraan pegawai berdasarkan data dan peraturan.

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai tugas pokok dan fungsi mengonsep rencana, membagi tugas, member petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, meneliti, memantau dan mengevaluasi penyusunan pedoman, petunjuk teknis, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisir, data dari masing-masing bidang, menyiapkan perumusan program perencanaan, penyajian data, informasi, sinkronisasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan dalam lingkup Badan sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan ketentuan.

c. Bidang – bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu

1. Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan membawahi :

Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan konsep rumusan rencana kegiatan,



mengkoordinasikan, member petunjuk, mengatur dan menilai pelaksanaan kegiatan Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan serta menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan program kerjadan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup urusan dan tugas Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan berdasarkan peraturan dan ketentuan. Bidang ini membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu :

a) Sub Bidang Distribusi, Akses Pangan dan Harga Pangan

Sub Bidang Distribusi, Akses Pangan dan Harga Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi menganalisis data fasilitas distribusi dan akses pangan, identifikasi infrastruktur distribusi pangan, pengembangan infrastruktur dan koordinasi pencegahan penurunan akses pangan dan meningkatkan akses pangan masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas pengumpulan dan pengolahan data terselenggara dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

b) Sub Bidang Kerawanan dan Ketersediaan Pangan

Sub Bidang Kerawanan dan Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi menganalisis data distribusi pangan dan identifikasi ketersediaan pangan, identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat serta pembinaan cadangan pangan masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas pengumpulan dan pengolahan data terselenggara dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan, membawahi :

Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan serta melakukan koordinasi



dengan dinas/instansi/lembaga terkait dalam rangka mewujudkan konsumsi masyarakat yang mengacu kepada Pola Konsumsi Pangan berdasarkan ketentuan. Bidang ini membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu :

a) Sub Bidang Pola Konsumsi Pangan

Sub Bidang Pola Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan, menyusun rencana, menganalisa, membina, memantau dan mengevaluasi konsumsi pangan, serta menyusun kebijakan teknis pola konsumsi pangan, dan mengkoordinasikan dengan tugas sub bidang pola konsumsi pangan berdasarkan peraturan.

b) Sub Bidang Teknologi dan Keamanan Pangan

Sub Bidang Teknologi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi dan keamanan pangan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan teknologi dan keamanan pangan berdasarkan ketentuan.

3. Bidang Penyuluhan dan Kelembagaan, membawahi :

Bidang Penyuluhan dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan dan rencana penyuluhan dan kelembagaan berkedudukan sebagai unsure pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Kepala Bidang Penyuluhan dan Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang ini membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu :

a) Sub Bidang Penyuluhan dan Pendidikan Latihan

Sub Bidang Penyuluhan dan Pendidikan Latihan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan dan rencana penyuluhan



dan pendidikan latihan berkedudukan sebagai unsure pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan.

b) Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan

Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyusun rencana kerja, kebijakan, dan pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan, membina kelembagaan tani, melaksanakan bimbingan sesuai tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan kelembagaan berdasarkan peraturan.

d. Unit Pelaksana Teknis Badan

Unit pelaksana teknis badan ketahanan pangan dan penyuluhan telah ada di setiap kecamatan yaitu :

1. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Koto XI Tarusan
2. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Bayang
3. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) IV Nagari Bayang Utara
4. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) IV Jurai
5. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Batang Kapas
6. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Sutera
7. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Lengayang
8. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Ranah Pesisir
9. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Linggo Sari Baganti
10. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Air Pura
11. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Pancung Soal
12. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Basa Ampek Balai Tapan
13. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Ranah Ampek Balai Tapan
14. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Lunang



15. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Silaut

e. Kelompok Jabatan Fungsional



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan RENSTRA Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun 2011-2015.

1. Visi dan Misi

Visi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah “ ***Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Sumberdaya Petani Nelayan Kabupaten Pesisir Selatan*** “

Makna yang terkandung dalam Visi diatas adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi kabupaten sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012.
- Sumberdaya petani dan nelayan adalah pelaku utama dan pelaku usaha disektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

Untuk mencapai visi tersebut misi yang diemban adalah sebagai berikut:

- a. Mengupayakan ketersediaan kecukupan pangan masyarakat
- b. Memasyarakatkan dan meningkatkan mutu konsumsi dan panganekaragaman pangan



- c. Mengupayakan kelancaran pelaksanaan distribusi pangan
- d. Pemberdayaan kelembagaan penyuluhan
- e. Memfasilitasi kelompok tani nelayan dengan pelaku usaha
- f. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi.
- g. Mengoptimalkan peran penyuluh dalam pembinaan kemandirian kelompok tani nelayan dilapangan.
- h. Menciptakan iklim yang kondusif bagi petani nelayan untuk menumbuhkembangkan organisasinya secara partisipatif.
- i. Meningkatkan kemampuan petugas, pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengakses dan menganalisa potensi pasar dan wilayah.
- j. Meningkatkan kemampuan daya saing dalam mengelola usaha tani berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- k. Mengembangkan kemampuan untuk menciptakan teknologi spesifik lokasi
- l. Meningkatkan Kompetensi petugas penyuluh melalui diklat dan pembinaan karir.
- m. Meningkatkan fungsi Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)
- n. Terbentuknya Pos Penyuluhan Pertanian Nagari di tingkat nagari.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya ketersediaan pangan masyarakat.
- b. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan akses pangan untuk turut serta memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat.
- c. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi guna menurunkan konsumsi beras.
- d. Mengembangkan sistem penanganan keamanan pangan segar.



- e. Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal.
- f. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan.
- g. Tersedianya informasi kegiatan usaha petani nelayan.
- h. Terjalinnya kemitraan yang sejajar antara petani nelayan dengan penyedia modal dan pelaku usaha.
- i. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.
- j. Meningkatkan fungsi kelembagaan petani nelayan.
- k. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani nelayan dalam melaksanakan usaha taninya.
- l. Meningkatkan kinerja penyuluh pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam membina kelompok tani nelayan.

Sasaran yang ingin dicapai :

- a. Meningkatnya kemampuan produksi bahan pangan pokok terutama pada kampung dan nagari yang tergolong rawan ketersediaan pangan.
- b. Terbentuk dan terberdayakannya kelembagaan pangan yang dapat mendukung terciptanya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga, kampung /nagari.
- c. Makin berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan minimal 1% pertahun.
- d. Tersedia dan terdistribusinya pangan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
- e. Terkendalinya harga pangan pokok di setiap waktu.
- f. Terdiversifikasinya sumber-sumber karbohidrat non beras guna menurunkan konsumsi beras.
- g. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, berkualitas dan terjangkau.



- h. Meningkatkan pengendalian, penanganan dan keamanan pangan segar melalui peran serta produsen dan konsumen.
- i. Terbentuknya industri rumah tangga yang mengolah bahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan.
- j. Mengefektifkan koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.
- k. Peningkatan kegiatan usaha tani nelayan.
- l. Terciptanya kerja sama yang saling menguntungkan antara petani dengan penyedia modal dan pelaku usaha.
- m. Peningkatan kesejahteraan petani nelayan.
- n. Meningkatnya pihak pemerintah dan swasta dalam menyalurkan program-program pengembangan usaha tani nelayan.
- o. Terciptanya kemandirian petani dan nelayan.
- p. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

3. Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan

Untuk memcapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan tahun 2011-2015, dibagi dalam 4 (empat) strategi yaitu :

a. Strategi I yang digunakan untuk mencapai sasaran

- Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan segar
- Mendorong peran serta swasta, masyarakat sipil, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan pengawasan keamanan pangan segar.



- Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan ketahanan pangan masyarakat
- Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas penyuluh
- Memfasilitasi petani nelayan dengan pihak swasta
- Menumbuhkan lembaga keuangan mikro dan terjadinya akses permodalan pada petani
- Menumbuhkan pos penyuluhan di tingkat nagari
- Mempertahankan dan meningkatkan jumlah dan mutu jenis sapi lokal ciri khas Pesisir Selatan.
- Pengembangan budidaya plasma nutfra sapi pesisir
- Peningkatan budidaya ikan kerapu dan penyu
- Mengembangkan kawasan agropolitan

b. Strategi II yang digunakan untuk mencapai sasaran

- Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar
- Melakukan monitoring keluar masuk bahan makanan di pos penjagaan
- Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat
- Melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang panganekaragaman konsumsi pangan
- Melakukan kerja sama dengan TP-PKK dalam mensukseskan P2KP
- Melakukan promosi kegiatan P2KP melalui media masa dan elektronik
- Menyusun rencana kerja penyuluh sesuai dengan wilayah kerja



- Menyusun program penyuluhan mulai dari tingkat nagari, kecamatan dan Kabupaten
- Menyusun jadwal training di setiap wilayah kerja Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)
- Menyusun jadwal kunjungan penyuluh ke kelompok tani
- Menyusun Jadwal supervisi tingkat Kecamatan dan Kabupaten
- Melakukan kerja sama dengan balai penelitian dan perguruan tinggi

c. Strategi III yang digunakan untuk mencapai sasaran

- Kerjasama dengan perbankan, dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan untuk penyaluran komoditi unggulan daerah.
- Peningkatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi untuk mengendalikan kerawanan pangan di daerah.
- Dibentuknya lembaga keuangan desa untuk mengendalikan peredaran keuangan bantuan sosial di masyarakat nagari.
- Memberikan penghargaan dan sanksi terhadap petugas dan kelompok tani nelayan.
- Menjaga stabilitas pasokan dan harga serta pengendalian bahan pangan pokok sepanjang tahun dan pangan strategis pada periode khusus/tertentu
- Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan (PPH)
- Melakukan koordinasi tentang alih fungsi lahan dengan instansi terkait dan melibatkan tokoh adat serta tokoh agama.
- Peningkatan pengawasan bahan pangan pokok dan segar
- Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pupuk organik/alternatif
- Melaksanakan sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SL-PHT)



d. Strategi IV yang digunakan untuk mencapai sasaran

- Tetapan pola karir sebagai acuan standar promosi dalam jabatan
- Tingkatkan sarana dan prasarana
- Menyediakan anggaran yang cukup agar terlaksananya kegiatan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan Bupati Pesisir Selatan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dalam bentuk Penetapan Kinerja. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mengacu pada dokumen Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun 2011-2015, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 1.
Penetapan Kinerja Tahun 2015

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
(1)		(2)	(3)	(6)	(7)
Terbentuk dan terberdayakannya kelembagaan pangan yang dapat mendukung terciptanya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga, kampung / nagari	1.	Jumlah kelompok Desa Mandiri Pangan	14 kelompok Desa Mandiri Pangan di 4 kecamatan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebun) Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	46,547,000.00
	2.	Jumlah cadangan pangan masyarakat, kampung / nagari	23 Kelompok Lumbung Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebuan) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	50,775,000.00
	3.	Jumlah cadangan pangan pemerintah	24.500 Kg Beras,	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebuan) Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	301,132,000.00
	4.	Jumlah sarana pendukung gudang cadangan pangan masyarakat	1 Unit Gudang Hauler 1 Unit Hauler	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebuan) Kegiatan Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK dan Pendamping) Kegiatan Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (Penunjang DAK)	200,000,000.00 8,000,000.00
J U M L A H					606,454,000.00
Tersedianya dan terdistribusinya pangan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat	1.	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	5 Gapoktan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebuan) Kegiatan Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)	49,545,000.00
	2.	Jumlah pemantauan	15 Kecamatan selama 52 Minggu	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebuan)	



				Kegiatan Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan (Pasokan Pangan, Akses Pangan, Harga Pangan dan HBKN)	41,397,500.00
J U M L A H					90,942,500.00
Terdiversifikasinya sumber-sumber karbohidrat non beras guna menurunkan konsumsi beras	1.	Jumlah lomba dan promosi	2 Kali Lomba B2SA, 2 Kali Pameran Promosi	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	315,899,000.00
	2.	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang dibina	23 Kelompok Wanita Tani	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	65,000,000.00
J U M L A H					380,899,000.00
Meningkatnya pengendalian, penanganan dan keamanan pangan segar melalui peran serta produsen dan konsumen	1.	Porsentase peningkatan pengendalian, penanganan dan keamanan pangan segar	90%	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tk Produsen dan Konsumen	168,326,800.00
J U M L A H					168,326,800.00
Mengefektifkan koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan	1.	Rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	1 Kali pertemuan rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Melalui Dewan Ketahanan Pangan	108,897,000.00
	2.	Jumlah Buku Informasi Ketahanan Pangan	20 Buku NBM	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebuan) Kegiatan Penyusunan Analisis Neraca Bahan Makanan	46,997,500.00
			20 Buku FSVA	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebuan)	



				Kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	48,695,500.00
			15 Buku PPH	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan	46,095,500.00
J U M L A H					250,685,500.00
Terciptanya kemandirian petani dan nelayan	1.	Laporan Programa	1 dokumen programa kabupaten, 15 dokumen programa kecamatan	Program Peningkatan Penerapan Tekhnologi Pertanian/Perkebunan/ Perikanan Kegiatan Penyusunan Programa (Tk Kecamatan, Kabupaten dan Nagari)	67,078,000.00
	2.	Jumlah Kelompok FMA	30 FMA	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	66,592,000.00
J U M L A H					133,670,000.00
Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dalam membina kelompok tani nelayan	1.	Jumlah Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan	15 BPK, 176 PPL dan THL	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan / Perikanan	
				Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan / Perikanan	270,084,200.00
				Kegiatan Training di Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)	63,664,900.00
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	
				Kegiatan Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) (DAK dan Pendamping)	1,119,999,800.00
				Kegiatan Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) (Penunjang DAK)	42,503,500.00
J U M L A H					1,496,252,400.00
J U M L A H T O T A L					3,127,230,200.00



Pada tahun 2015, Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terbentuk dan terberdayakannya kelembagaan pangan yang dapat menunjang terciptanya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga, kampung / nagari.

Indikator kinerjanya :

- Jumlah Kelompok Desa Mandiri Pangan dengan target 14 kelompok desa mandiri pangan di 4 Kecamatan.
 - Jumlah cadangan pangan masyarakat, kampung / nagari dengan target 23 kelompok lumbung pangan.
 - Jumlah cadangan pangan pemerintah dengan target 24.500 Kg beras.
2. Tersedianya dan terdistribusikannya pangan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Indikator kinerjanya :

- Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan target 5 Gapoktan.
 - Jumlah pemantauan harga pangan dengan target 15 kecamatan selama 52 minggu
3. Terdiversifikasikannya sumber-sumber karbohidrat non beras guna menurunkan konsumsi beras.

Indikator kinerjanya :

- Jumlah lomba dan promosi yang dilaksanakan dengan target 2 kali lomba menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan 2 kali pameran promosi
 - Jumlah Kelompok Wanita Tani yang dibina dengan target 23 Kelompok Wanita Tani.
4. Meningkatnya pengendalian, penanganan dan keamanan pangan segar melalui peran serta produsen dan konsumen.

Indikator kinerjanya :



- Persentase peningkatan pengendalian, penanganan dan keamanan pangan segar dengan target 90%.

5. Mengefektifkan koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Indikator kinerjanya :

- Jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan, dengan target 1 kali pertemuan rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.
- Jumlah buku informasi ketahanan pangan dengan target 20 buku analisis ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM), 20 buku Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), dan 15 buku analisis konsumsi pangan pangan masyarakat berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH)

6. Terciptanya kemandirian petani dan nelayan.

Indikator kinerjanya :

- Laporan program dengan target tersedianya 1 dokumen program kabupaten dan 15 dokumen program kecamatan.
- Jumlah Kelompok FMA dengan target pembinaan dan pengembangan 30 kelompok FMA.

7. Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dalam membina kelompok tani nelayan.

Indikator kinerjanya :

- Jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dengan target 15 Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK), 176 PPL dan THL.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 menggunakan metode yang diatur dalam Peranturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		2017	
			Target	Realisasi
(1)	(2)		(3)	(4)
Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	1.	Persentase Nilai PPID	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah
	2.	Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Pesisir Selatan dan website Diskominfo	100%	100%
	3.	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang terbina	15 Kelompok Informasi Masyarakat	15 Kelompok Informasi Masyarakat
	4.	Jumlah Operasional Radio/TV Kabupaten Pesisir Selatan	1 Radio Langkisau FM	1 Radio Langkisau FM
	5.	Persentase Penyebaran Informasi kepada Masyarakat	100%	100%
	6.	Jumlah Menara Radio Langkisau	1 Menara Radio	1 Menara Radio
	7.	Persentase Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah	100%	100%
Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi	1.	Jumlah Sumber Daya Manusia TIK Kabupaten	135 Orang (3 kali Bimtek @ 45 Org)	135 Orang (3 kali Bimtek @ 45 Org)
	2.	Persentase peraturan dan perundang-undangan	100%	100%
	3.	Jumlah Master Plan Teknologi Informasi Komunikasi	1 master plan	1 master plan



	4.	Persentase Integrasi Smart City Kabupaten Pesisir Selatan	100%	100%
Meningkatnya kualitas data pemerintah daerah	1.	Jumlah Data Statistik Daerah	200 buah buku PSDA	200 buah buku PSDA

Pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Adapun target kinerja pada masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a. Operasional Radio Daerah

- Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 482.166.493,00
- Keluaran
Terselenggaranya Operasional LPPL Radio Langkisau FM
- Hasil
Tersedianya Meubiler dan Peralatan Broadcasting Radio Set

b. Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Operasional Komunikasi (Santel)

- Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 50.864.000,00
- Keluaran
Terlaksananya pemeliharaan dan penunjang operasional peralatan persandian
- Hasil



Tersedianya peralatan persandian untuk pengumpulan dan penyebaran informasi.

c. Operasional Penerangan Keliling, Pameran dan Posko Informasi

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 78.538.450,00

- Keluaran

Terlaksananya penyebaran informasi melalui mobil unit penerangan keliling, posko informasi dan pameran

- Hasil

Terpenuhinya penyebaran informasi pemerintah dan masyarakat melalui mobil unit penerangan keliling, posko informasi dan pameran.

d. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 62.991.000,00

- Keluaran

Terlaksananya pengembangan dan penyebaran informasi dan komunikasi melalui kelompok informasi masyarakat (KIM) dan penilaian media tradisional.

- Hasil

Terbentuknya dan terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat serta penilaian media tradisional.

e. Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah Melalui Website

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 133.177.300,00

- Keluaran



Terlaksananya pengumpulan dan penyebaran informasi dan komunikasi melalui website pemerintah daerah.

- Hasil

Adanya informasi pemerintah dan masyarakat kabupaten pesisir selatan di website pemerintah daerah (www.pesisirselatankab.go.id)

f. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Menara Radio Langkisau

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 156.261.000,00

- Keluaran

Terlaksananya rehabilitasi dan perawatan Menara radio pemerintah langkisau

- Hasil

Adanya rehabilitasi dan perawatan Menara radio pemerintah daerah.

g. Pengembangan Sumberdaya TIK Kabupaten

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 161.972.000,00

- Keluaran

Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi aparatur pemerintah.

- Hasil

Adanya peningkatan SDM aparatur dalam bidang TIK melalui pelatihan dan bimbingan teknis aparatur.

h. Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Komunikasi dan Informatika.

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 58.471.000,00

- Keluaran



Terlaksananya pembuatan peraturan pemerintah tentang LPPL radio langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan

- Hasil

Tersedianya Peraturan Daerah tentang LPPL Radio Langkisau FM

2. Program Kerjasama Informasi dan Media Masa

a. Publikasi dan Promosi Daerah

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 191.957.000,00

- Keluaran

Terlaksananya publikasi dan informasi pemerintah Kabupaten Pesisir melalui media elektronik

- Hasil

Adanya publikasi dan penyebaran informasi melalui media elektronik tentang Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Informasi

a. Pengembangan Sumber Daya TIK Kabupaten

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 301.892.000,00

- Keluaran

Terlaksananya penyusunan perencanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Kabupaten Pesisir Selatan.

- Hasil

Tersedianya buku panduan penyusunan perencanaan TIK Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Penyediaan Data Statistik Daerah

- Masukan



Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 71.237.000,00

- Keluaran

Terlaksananya penyusunan data dan informasi statistik sektoral Kabupaten Pesisir Selatan.

- Hasil

Tersedianya buku/laporan data dan informasi statistik sektoral pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Program Penyelenggaraan E-Government

a. Pembangunan Smart City Kabupaten Pesisir Selatan

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 2.263.334.300,00

- Keluaran

Terlaksananya pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika dan data server Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Hasil

Terkoneksinya semua perangkat daerah dan puskesmas dengan akses data informasi dan terpusatnya aplikasi, data dan informasi untuk penunjang pelayanan dan penyelenggaraan e government.

5. Program Pelayanan Informasi Publik

a. Operasional Pelayanan Informasi Publik

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 98.006.500,00

- Keluaran

Terlaksananya keterbukaan informasi public melalui lembaga pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.



- Hasil

Adanya pelayanan informasi publik pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui PPID Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Komentar [EA1]:

3.1 Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Analisa capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 disajikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan e-Government

Tujuannya :

- Meningkatnya tata kelola pemerintahan secara elektronik
- Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel

Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dengan uraian sebagai berikut:

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu:

- Keterlambatan pelaksanaan pembangunan jaringan di kecamatan yang semestinya dapat dilaksanakan pada bulan Januari mundur pada bulan Juni Tahun 2017.

Penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu keterlambatan pihak vendor (PT.Telkom) dalam menarik jaringan fiber optic ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan karena



memerlukan waktu yang lebih disebabkan geografis Kabupaten Pesisir Selatan

2. Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial, dan kemitraan profesi

Tujuan :

- Meningkatnya penyebarluasan informasi
- Meningkatkan informasi dan KIM
- eksistensi PPID dan kemitraan profesi

Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan yaitu:
 - Kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana semua, Pembinaan KIM sebanyak 15 Kecamatan, Pemilihan Media Tradisional di Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
 - Kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang disusun, PPID Utama adalah Dinas Komunikasi dan Informatika dan perangkat daerah merupakan PPID Pembantu. PPID memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan terbentuknya Daftar Informasi Publik (DIP) Kabupaten Pesisir Selatan, terpublikasinya informasi melalui website serta terlayani permohonan informasi publik.
 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sudah mempublikasi informasi daerah melalui website pemerintah,



dan terlaksananya operasional Radio Langkisau FM yang membantu sebagian publikasi melalui media radio.

B. EVALUASI KINERJA SASARAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Komunikasi dan Informatika. Dengan pembentukan organisasi perangkat daerah baru tersebut program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017 mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PERIM.Kominfo/12/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.

Evaluasi terhadap kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pembangunan e government berbasis smart city.

- **Kegiatan Pembangunan Smart City Kabupaten Pesisir Selatan dengan capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran 90,00 %.**

Kegiatan Pembangunan Smart City Kabupaten Pesisir Selatan merupakan pembangunan infrastruktur dan mengintegrasikan semua aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini jaringan smart city sudah terintegrasi sebanyak 45 perangkat daerah dan 10 puskesmas.

- **Kegiatan Pengembangan Sumberdaya TIK Kabupaten dengan capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran 94,00 %**

Kegiatan Pengembangan Sumberdaya TIK Kabupaten adalah terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi



aparatur pemerintah. Dari pelaksanaan kegiatan ini dilatih 90 (sembilan puluh) orang dari semua perangkat daerah.

- **Kegiatan Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah melalui Website dengan capaian kinerja 92 % dan realisasi anggaran 92 %**

Kegiatan ini adalah melaksanakan pengumpulan dan penyebaran informasi dan komunikasi melalui website pemerintah daerah (www.pesisirselatankab.go.id) yang bisa langsung diakses oleh masyarakat.

2. Tersedianya Informasi publik pemerintah daerah

- **Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dengan capaian kinerja 300 % dari target yang ditetapkan, dan realisasi anggaran 98.00%.**

Kegiatan ini untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di Kecamatan untuk menyampaikan informasi pemerintah daerah. Kelompok Informasi Masyarakat merupakan wadah dan perpanjangan tangan pemerintah dalam penyampaian informasi pemerintah daerah. Melalui informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, masyarakat KIM dapat menerapkannya dalam berbagai aktivitas perdagangan, pertanian, industri dan menghasilkan tambahan pendapatan dari aktivitas tersebut, informasi yang diperoleh dari berbagai media dan sumber lainnya, masyarakat dapat memperoleh informasi peluang-peluang usaha, permintaan pasar mengenai berbagai produk dan jasa, kemudian KIM dapat melakukan transaksi bisnis, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai tambah ekonomi, informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dikemas sedemikian rupa dalam bentuk bahan informasi (buku, bulletin, bahan audio visual)



Tabel 2.
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informas Masyarkat
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Nagari	Nama Ke
1	Koto XI Tarusan	Pulau Karam	1. Sanggar Seni Elok Saiyo
			2. Sanggar Seni Tuah Sakato
			3. Sanggar Seni Atok Rumbio
2	Bayang	Tanjung Durian	1. Sanggar Batu Putih
			2. Saiyo Sakato
			3. Bayang Palito
3	IV Jurai	Painan Timur	1. Langkisau
		Painan	2. Sanggar San Alida
		Painan Selatan	3. Sanggar Andam Suri
		Painan Timur	4. Sanggar “ Yo Baiyo”
4	Batang Kapas	IV Koto Hilie	1. Gadih Nan Jombang
			2. Sanggar Gadih Basanai
		Taluak tigo sakato	3. Salendang Dunia Limau Sundai
5	Sutera	Koto Nan Tigo Selatan	1. Caidaiyani
6	Lengayang	Lakitan Utara / Kp.Pdg Marapalam	1. Sikambang Group
		Kampung Lubuak sariiek / kambang utara	2. Galombang Maimbau
			3. Pinang Sinama Tuah Sakato
		Kambang Utara	4. Nilo Nali Sikayan
7	Ranah Pesisir	Sungai Liku Labuhan	1. Timbulun Saiyo



			3. Palang Permai
8	Linggo Sari Baganti	Punggasan Utara	1. Alang Babega
9	Air Pura	Lubuk Betung	1. Pulau Rajo
			2. Puti Kumala Intan
			3. Darul Sakim Sakato
10	Pancung Soal	Tigo Sepakat	1. Sanggar Seni Rimbo Sarumpun
11	Basa Ampek Hulu Tapan	Dusun Baru	1. Silek Indo Jati
		Tanjung Pondok	2. Sasta Prima Fi
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	Pondok Binjai	1. Galombang Duo Baleh
13	Lunang	Sindang	1. Gandai Sindang Harapan Rumah Gadang Mandeh Rubiah
		Lunang Barat	2. Baringin Koto
		Kp Pasar Pagi Nag. Lunang Satu	3. Saiyo Sakato
14	Silaut	Sambungo	1. Asronggo Budoyo
		Silaut	2. Sanggar Seni Gandai
		Sei. Sarik	3. Gembong Srenggono
		Nagari Pasir Binjai	4. Tresno Budoyo
		Nagari Air Hitam	5. Taruna Budaya
		Lubuk Bunta	6. Tri Tunggal Budoyo
		Sungai Pulai	7. Singa Wana
		Nagari Lubuk Bunta	8. Krido Yakso
		Sungai Pulai	9. Turonggo Budoyo
		Sungai Sirah	10. Seni Tari Sekundang Merah
			11. Seni Tari Kreasi SMA 1 Silaut
		Durian Seribu	12. Seni Tari Nirmala
		Talang Binjai	13. Seni Tari Tor – Tor
		Sei. Serik	13. Gembong Srenggono

- Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik dengan capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran 95,93 %



Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik pada 45 perangkat daerah dengan melakukan sosialisasi pejabat pengelola informasi pemantauan dan dokumentasi pemerintah. PPID bertujuan untuk melaksanakan keterbukaan informasi public melalui lembaga pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memberikan pelayanan informasi public Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui PPID Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Perkembangan Data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Nama OPD	Daftar Informasi Publik			Daftar Informasi Yang Dikecualikan	Keterangan
		Serta Merta	Berkala	Setiap saat		
1.	Sekretariat Daerah	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
2.	Sekretariat Dewan DPRD	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
3.	Inspektorat	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
5.	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy



8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
9.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
10.	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
11.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
12.	Dinas Perikanan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
13.	Dinas Pangan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
15.	Dinas Perhubungan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
16.	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
17.	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
18.	Dinas Pengelola Sumber Daya Air	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
19.	Dinas Komunikasi dan Informatika	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
20.	Informatika Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
21.	Dinas Lingkungan Hidup	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy



23.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
24.	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan pengembangan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
25.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
26.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
27.	Badan Pendapatan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
28.	Badan Penanggulangan Bencana	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
29.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
30.	RSUD M. Zein Painan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
31.	Kecamatan Koto XI Tarusan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
32.	Kecamatan Bayang	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
33.	Kecamatan Bayang Utara	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
34.	Kecamatan IV Jurai	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
35.	Kecamatan Batang Kapas	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
36.	Kecamatan Sutera	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
37.	Kecamatan Lengayang	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
38.	Kecamatan Ranah Pesisir	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy



39.	Kecamatan Linggo Sari Baganti	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
40.	Kecamatan Pancung Soal	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
41.	Kecamatan Airpura	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
42.	Kecamatan Rahul	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
43.	Kecamatan BAB Tapan	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
44.	Kecamatan Lunang	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy
45.	Kecamatan Silaut	✓	✓	✓	✓	Hard dan Soft Copy

- **Kegiatan Operasional Radio Daerah dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 99,51 %.**

Kegiatan ini meliputi penyediaan sarana dan prasarana radio serta penyelenggaraan operasional radio Langkisau FM.

Radio Langkisau FM merupakan sarana informasi yang menyampaikan tentang pembangunan daerah. Radio Langkisau FM sudah memiliki sarana dan prasarana yang bisa melaksanakan operasional radio sesuai dengan standar nasional.

- **Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Menara Radio Langkisau dengan capaian 100 % dan realisasi anggaran 96 %.**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan operasional radio. Menara tersebut salah satunya sebagai tempat untuk penyiaran gelombang



yang akan ditangkap oleh penangkap gelombang seperti radio, untuk itu diperlukan pemeliharaan terhadap menara radio Langkisau FM.

- **Kegiatan Operasional Penerangan Keliling, Pameran dan Posko Informasi dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 92,90 %.**

Kegiatan ini adalah melaksanakan penyampaian informasi pemerintah daerah melalui Mobil Penerangan Keliling, pelaksanaan pameran dan mendirikan posko informasi yang akan menyampaikan informasi pemerintah daerah.

3. Tersedianya Data Statistik Sektoral

- **Kegiatan Penyediaan Data Statistik Daerah dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 97,10 %.**

Kegiatan ini adalah memfasilitasi pengumpulan data pemerintah daerah dan melaksanakan pencetakan buku Pesisir Selatan Dalam Angka yang nantinya akan berguna bagi perangkat daerah dalam penggunaan data pemerintah daerah.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja keuangan dalam rangka realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja pembangunan komunikasi dan informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 yaitu dengan alokasi anggaran Rp. 5.572.210.843,- dan terealisasi Rp. 4.863.425.500,- atau tingkat penyerapannya yaitu 89,90 %, dengan rincian sebagaimana pada Tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4
Capaian Keuangan Sasaran

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan layanan komunikasi dan	1.	Persentase Nilai PPID	45 Perangkat Daerah	Program Pelayanan Informasi Publik		



informatika				Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi publik	98,006,500.00	93.056.500.00
	2.	Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Pesisir Selatan dan website Diskominfo	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah melalui Website	133,177,300.00	123.000.000.00
	3.	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang terbina	15 Kelompok Informasi Masyarakat	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	62,991.000.00	61.901.000.00
	4.	Jumlah Operasional Radio/TV Kabupaten Pesisir Selatan	1 Radio Langkisau FM	Kegiatan Operasional Radio Daerah	482,166,493,00	477.066.493.00
	5.	Persentase Penyebaran Informasi kepada Masyarakat	100 %	Kegiatan Operasional Penerangan Keliling, Pameran dan Posko Informasi	78,538,450.00	72.052.603.00
	6.	Jumlah Menara Radio Langkisau	1 Menara Radio	Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Menara Radio Langkisau	156,261,000.00	149.576.000.00
	7.	Persentase Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah	100%	Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa Kegiatan Publikasi dan Promosi Daerah	191,957,000.00	184.585.500.00
J U M L A H					971,913,943.00	1.161.238.096.00
Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi	1.	Jumlah Sumber Daya Manusia TIK Kabupaten	135 Orang (3 kali Bimtek @ 45 Org)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa		



				Kegiatan Pengembangan Sumberdaya TIK Kabupaten	161,972,000.00	152.765.100.00
	2.	Persentase peraturan dan perundang-undangan	100 %	Kegiatan Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Komunikasi dan Informatika	58,471,000.00	56.278.900.00
	3.	Jumlah Master Plan Teknologi Informasi Komunikasi	1 master plan	Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Informasi Kegiatan Pembuatan Master Plan Teknologi informasi Komunikasi (TIK) Kabupaten Pessel	301,892,000.00	374.000.00
	4.	Persentase Integrasi Smart City Kabupaten Pesisir Selatan	100%	Program Penyelenggaraan E Government Kegiatan Pembangunan Smart City Kabupaten Pesisir Selatan	2,263,334,300.00	2.042.005.054.00
J U M L A H					2,785,669,300.00	2.251.864.054.00
Meningkatnya kualitas data pemerintah daerah	1.	Jumlah Data Statistik Daerah	200 buah buku PSDA	Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Informasi Kegiatan Penyediaan Data Statistik Daerah	71,237,000.00	69.000.000.00
J U M L A H					71,237,000.00	69.000.000.00
JUMLAH TOTAL					3,828,820,243.00	3.482.102.150.00



BAB IV

PENUTUP

Dari data yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Kegiatan Tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat capaian kinerja kegiatan pada tahun 2017 sesuai dengan target yang telah direncanakan pada tahun 2017 terealisasi 100 %.
2. Tingkat capaian kinerja sasaran tahun 2017 sesuai dengan target yang telah direncanakan terealisasi 100 % kecuali peningkatan pengendalian, penanganan dan keamanan pangan segar melalui peran serta produsen dan konsumen hanya mencapai 74,63 %. Hal ini disebabkan dari hasil uji laboratorium 20 sampel ikan ditemukan mengandung formalin, sehingga kedepan perlu ditingkatkan pengendalian dan pembinaannya.
3. Tercapainya kinerja sasaran dan kegiatan dengan baik disebabkan antara lain :
 - a. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, jumlah pegawai yang dimiliki cukup banyak dengan SDM yang dimiliki pada umumnya Sarjana.
 - b. Program – program Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan pada tahun 2017, telah mencapai tujuan dan sasaran terutama Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan E Government yang bekerja dengan optimal sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berjalan semestinya.
4. Meskipun kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berjalan optimal namun kendala – kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugas masih banyak, antara lain :



- a. Sarana dan prasarana penunjang operasional masih minim jika dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada.
 - b. Biaya operasional belum memadai karena pada saat penyusunan anggaran 2017 belum disusun secara rasional.
 - c. Masih minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan e government sehingga belum sepenuhnya perangkat daerah dan nagari-nagari bisa terintegrasi dengan baik.
5. Untuk kedepannya diharapkan alokasi anggaran dapat ditingkatkan bagi pembangunan Komunikasi dan Informatika periode RPJMD 2016-2021.

